



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
KE PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 13 – 15 NOVEMBER 2024**

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Komisi II DPR RI menyambangi kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja spesifik (Kunsfek) terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di Gedung Pakuan, Rumah Jabatan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (13/11/2024).

Dua hari sebelumnya, PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dan para PJ Bupati dan Walikota Se Jawa Barat juga telah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (11/11/2024) dengan memaparkan semua bentuk persiapan dan kesiapan pemprov Jawa Barat dalam menyukseskan pilkada serentak di Jawa Barat.

Kunsfek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi Demokrat Dr. Dede Yusuf, M.E, ST, M.IPol sebagai ketua tim bersama rombongan anggota komisi II DPR RI yakni Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A (PDIP), Komarudin Warubun, S.H, M.H, (PDIP), Meutya Hafid (Golkar), Ahmad Irawan, SH, MH (Golkar), Heri Gunawan, SE, MAP (Gerindra), Ir Esthon L Foeny, M.Si (Gerindra), Ujang Bey, S.IP, M.IP (Nasdem), Saan Mustofa (Nasdem), Indrajaya, S.E (PKB), KH. Aus Hidayat Nur (PKS) dan Ir.H Ateng Sutisna (PKS).

12 anggota Komisi II DPR ini bertemu dengan PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dan jajaran, para PJ Bupati dan Walikota Se Provinsi Jawa Barat, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Gakkumdu Provinsi Jawa Barat, dan dihadiri pula oleh KPU RI, Bawaslu RI, Kementerian Dalam Negeri, para komisioner KPU kab/kota se Provinsi Jawa Barat, serta para komisioner Bawaslu Kab/Kota se Provinsi Jawa Barat.

Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga merupakan ketua TIM Kunsfek menuturkan bahwa karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah DPT dan TPS terbanyak di Indonesia, maka potensi pelanggaran dan kecurangannya juga cukup besar. Sehingga upaya mitigasi dari Pemprov Jabar dan stakeholder harus diintensifkan dan dimasifkan.

Politisi Demokrat itu mengingatkan pemprov Jawa Barat dan seluruh stakeholder termasuk KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Barat, Kodam, Polda Jabar untuk melakukan upaya mitigasi segala bentuk potensi pelanggaran Pilkada 2024 di Jabar mulai dari netralitas ASN, politik uang termasuk penyebaran yang palsu, isu sara, penyebaran hoax, ujaran kebencian, termasuk kampanye hitam.

Selain itu politisi asal Jawa Barat itu juga mengingatkan agar memitigasi bencana alam seperti banjir yang bisa saja mengurangi tingkat partisipasi pemilih untuk hadir ke TPS.

Bey Machmudin, PJ Gubernur Jabar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dengan memfasilitasi koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan instansi terkait, terutama dalam menyelesaikan kendala operasional di lapangan.

Selain itu, pemerintah provinsi memberikan dukungan berupa pendanaan pilkada yang dialokasikan untuk menunjang kebutuhan teknis dan operasional KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan tahapan-tahapan pemilu. Dukungan tersebut diharapkan dapat memastikan kelancaran pelaksanaan pilkada di Jawa Barat, sehingga proses pemilihan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Terkait netralitas ASN, Bey menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan serentak nasional tahun 2024, memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap menjalankan tugas secara objektif dan profesional.

"Komitmen ini diwujudkan melalui deklarasi netralitas ASN yang dikenal dengan "Jabar Anteng", sebagai bentuk ikrar seluruh ASN untuk bersikap netral selama tahapan pemilihan berlangsung" paparnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegakkan peraturan terkait Netralitas ASN dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, tidak hanya hukuman disiplin, tetapi bisa sampai dengan hukuman pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Bandung, 13 November 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat.